

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan tolak ukur dalam menilai kinerja suatu manajemen perusahaan, namun tidak selalu mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Laporan keuangan sering menjadi target rekayasa oleh manajemen perusahaan terutama pada informasi yang terkait dengan laba (Christiani dan Nugrahanti, 2014). Manajemen perusahaan sering kali mengubah laba sesuai dengan kebutuhan mereka, misalnya untuk memenuhi kebutuhan dana, perusahaan akan menaikkan laba dan untuk pembayaran pajak, perusahaan akan menurunkan laba (Martani dan Kamila, 2014).

Fisher dan Rosenzweig (1995) dalam Sulistyanto (2008), menjelaskan manajemen laba merupakan tindakan manajemen perusahaan untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan tanpa menyebabkan kenaikan atau penurunan keuntungan ekonomi dalam perusahaan untuk waktu jangka panjang. Menurut Sulistyanto (2008), manajemen laba memiliki tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja manajemen dan kondisi perusahaan. Manajemen laba dalam sebuah perusahaan dapat dikatakan sebagai tindakan legal maupun illegal.

Manajemen laba legal merupakan manipulasi yang tidak bertentangan dengan standar akuntansi baik Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) maupun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sedangkan manajemen laba illegal, berarti tindakan manipulasi yang tidak sesuai atau

bertentangan dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan, misalnya dengan melaporkan angka-angka fiktif, memperbesar atau memperkecil angka dalam laporan keuangan perusahaan untuk mencapai target laba tertentu, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam negeri maupun luar negeri.

Penelitian Burgstahler dan Dichev (1997), mendapatkan bukti bahwa perusahaan biasa melakukan aktivitas manajemen laba untuk menghindari pelaporan laba yang turun atau rugi. Isu ini penting bagi investor yang menggantungkan keputusan investasinya berdasarkan atas informasi dalam laporan keuangan, terutama terkait komponen laba.

Pengertian persistensi laba pada prinsipnya dapat dipandang dalam dua sudut pandang. Pandangan pertama menyatakan bahwa persistensi laba berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambarkan dalam laba perusahaan. Pandangan ini menyatakan laba yang persisten tinggi terefleksi pada laba yang dapat berkesinambungan (*sustainable*) untuk satu periode yang lama, sedangkan pandangan kedua menyatakan persistensi laba berkaitan dengan kinerja harga saham pasar modal yang diwujudkan dalam bentuk imbal hasil, sehingga hubungan yang semakin kuat antara laba perusahaan dengan imbal hasil bagi investor dalam bentuk return saham menunjukkan persistensi laba yang tinggi (Ayres, 1994).

Aktivitas manajemen laba tinggi mengindikasikan kualitas laba rendah, namun manajemen laba rendah tidak serta merta mengindikasikan kualitas laba tinggi karena kualitas laba tinggi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor misalnya standar akuntansi yang buruk dan lain-lain. Sebagai proksi kualitas laba

dapat menggunakan ukuran persistensi laba (Schipper dan Vincent, 2003, Dechow, 2010, dan Atwood, 2010). Persistensi laba merupakan revisi laba yang diharapkan dimasa depan yang tercermin dari laba tahun berjalan (Meythi, 2006).

Naik turunnya laba suatu perusahaan dengan tingkat perubahan signifikan bahkan curam menyebabkan persistensi laba mulai dipertanyakan, ditambah lagi laba dalam laporan keuangan sering digunakan oleh manajemen untuk menarik calon investor, sehingga laba tersebut sering direayasa sedemikian rupa oleh manajemen untuk mempengaruhi keputusan investor. Persistensi laba menjadi pusat perhatian bagi para pengguna laporan keuangan, khususnya bagi mereka yang mengharapkan persistensi laba yang tinggi (Fanani, 2010).

Penman (2001) dalam Wijayanti (2006), mengungkapkan bahwa laba yang persisten adalah laba yang dapat mencerminkan keberlanjutan laba (*sustainable earnings*) dimasa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kas nya. Laba perusahaan yang mampu bertahan dimasa depan inilah yang mencerminkan laba yang berkualitas. Persistensi laba sering dianggap sebagai alat ukur untuk menilai kualitas laba yang berkesinambungan dan cenderung stabil atau tidak berfluktuasi disetiap periode (Purwanti, 2010). Persistensi laba menjadi bahasan yang sangat penting karena investor memiliki kepentingan informasi terhadap kinerja perusahaan yang tercermin dalam laba masa depan.

Fenomena mengenai persistensi laba suatu entitas di Indonesia, yang di ambil dari media elektronik adalah kasus PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) merevisi laporan keuangan tiga tahun terakhir, yaitu 2015, 2016, dan 2017. Langkah yang

dilakukan bank berkode BBKP itu menyita perhatian otoritas terkait, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Permasalahan mengenai *restated* (penyampaian kembali) laporan keuangan 2016 merupakan temuan dari manajemen yang telah disampaikan kepada Kantor Akuntansi Publik untuk dilakukan *restated* pada laporan keuangan 2017," ujar Direktur Utama Bukopin Eko Rachmansyah Gindo, tanpa mau merinci mengenai kasus ini kepada CNBC Indonesia. Manajemen Bukopin pun secara terang-terangan merevisi laporan keuangan dari 2015, 2016, dan 2017. Kenapa hanya tiga tahun? Karena penyajian kembali laporan keuangan dibatasi maksimal hanya 3 tahun terakhir.

Bank Bukopin merevisi laba bersih 2016 menjadi Rp 183,56 miliar dari sebelumnya Rp 1,08 triliun. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit ini turun dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar. Akibatnya, beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan direvisi meningkat dari Rp 649,05 miliar menjadi Rp 797,65 miliar. Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat Rp 148,6 miliar. Sebelum Otoritas melakukan klarifikasi, sebenarnya Bukopin telah 'dihukum' atas insiden ini. Bukopin telah merevisi turun ekuitas yang dimiliki sebesar Rp 2,62 triliun pada akhir 2016, dari Rp 9,53 triliun menjadi Rp 6,91 triliun. Penurunan itu karena revisi turun saldo laba Rp 2,62 triliun menjadi Rp 5,52 triliun karena laba yang dilaporkan sebelumnya tidak benar.

Sumber: <https://finance.detik.com/moneter/d-3994551/bank-bukopin-permak-laporan-keuangan-ini-kata-bi-dan-ojk>

Fenomena lain yang terkait dengan persistensi laba masih sama yaitu kasus PT bank bukopin Tbk yang kembali mencatatkan penurunan laba bersih, yaitu turun sebesar 53,77 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp. 120,34 miliar pada kuartal II/2019. Dikutip melalui laporan publikasi, salah satu kontribusi terbesar pada penurunan laba bersih perseroan, yaitu menurunnya pendapatan bunga bersih, menurun 30,28 persen menjadi Rp. 1,07 triliun.

Selain itu, pendapatan operasional selain bunga bank bukopin juga tercatat mengalami penurunan sebesar 5,89 persen menjadi Rp. 378,65 miliar pada paruh pertama tahun 2019 ini. Pada sisi rasio keuangan, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) perseroan tercatat sebesar 96,82 persen, meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 94,27 persen. Margin bunga bersih (*Net Interest Margin/NIM*) Bank Bukopin tercatat di level 2,45 persen pada kuartal II/2019, menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,10 persen.

Di sisi lain, himpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Bukopin meningkat 3,34 persen, dari Rp. 72,52 triliun pada Juni 2018 menjadi Rp. 74,94 triliun pada Juni 2019. Jika dirincikan, pertumbuhan DPK dikontribusi oleh himpunan deposito yang meningkat menjadi Rp. 46,32 triliun atau naik 8,83 persen. Sementara himpunan dana murah yang terdiri dari tabungan dan giro menurun 4,47 persen menjadi sebesar Rp. 28,62 triliun.

Sumber: <https://m.bisnis.com/amp/read/20190731/90/1130993/laba-bank-bukopin-kembali-merosot>

Fenomena tersebut menyebabkan peristensi laba mulai dipertanyakan karena laba dengan fluktuasi menurun suram dalam waktu yang singkat menunjukkan perusahaan tersebut tidak mampu untuk mempertahankan laba yang diperoleh saat ini maupun menjamin laba untuk masa depan. Bahkan karna laba dalam laporan keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk menarik calon investor, sehingga laba tersebut sering direayasa sedemikian rupa oleh manajemen untuk mempengaruhi keputusan investor (Fanani, 2010).

Bisnis dan politik merupakan dua kegiatan yang saling berkaitan. Hubungan bisnis dan politik bisa berjalan dengan saling berdampingan yang memberikan keuntungan satu sama lain untuk tercapainya suatu tujuan. Perusahaan yang berorientasi mencari keuntungan mengharapkan adanya timbal balik atau manfaat yang diperoleh dari sumbangan tersebut. Dari hubungan antara perusahaan dan politik kemudian muncul istilah koneksi politik (*Political Connection*) (Faccio, Masulis, dan McConnell, 2006).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persistensi laba adalah koneksi politik. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dapat memperoleh manfaat signifikan dari koneksi politik, termasuk akses istimewa ke pembiayaan, perlakuan istimewa dalam penghargaan kontrak pemerintah, dan kemungkinan *bailout* pemerintah yang lebih besar selama krisis (Karpoff, 1999, Agrawal dan Knoeber, 2001, Backman, 2001, Johnson dan Mitton, 2003, Khwaja dan Mian, 2005, Cull dan Xu, 2005, Faccio, 2006, Claessens, 2008, Goldman, 2011, Blau, 2013, dan Yeh, 2013). Selain itu, Chaney (2011) menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh pada kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Misalnya, karena perusahaan dapat mengamankan pembiayaan melalui koneksi politik mereka, mereka kurang memiliki kebutuhan untuk menanggapi eksternal tekanan pasar, menghasilkan pengungkapan informasi akuntansi berkualitas rendah. Implikasi kebijakan yang jelas merupakan peningkatan politik dan pembangunan ekonomi yang harus mengurangi kebutuhan perusahaan untuk mengandalkan koneksi politik dan meningkatkan kebutuhan perusahaan untuk merespon tekanan pasar (Faccio, 2006, Faccio, 2010, Chen, 2010, dan Boubraki, 2012).

Fisman (2001) menemukan perusahaan yang terhubung secara politis di Indonesia sangat bergantung pada manfaat dari koneksi mereka. Leuz dan Gee (2006), menunjukkan bahwa perusahaan yang terhubung menghadapi kesulitan pendanaan ketika koneksi politik mereka jatuh dari kekuasaan. Chaney (2009), menjelaskan perusahaan yang memiliki hubungan politik akan memperoleh berbagai keuntungan dari hubungannya tersebut. Misalnya, perusahaan dapat melakukan penggelapan atas pembayaran, menyembunyikan atau mengaburkan, atau menunda pelaporan untuk tujuan mengelabui para investor. Kedua, politisi memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang mempunyai relasi dengannya sehingga perusahaan dengan kualitas laporan keuangan yang rendah tidak terkena penalti. Ketiga, perusahaan yang memiliki kualitas laba yang rendah cenderung akan membangun hubungan politik.

Beberapa penelitian tentang hubungan politik menjelaskan bahwa perusahaan dengan hubungan politik cenderung memperoleh keuntungan dari hubungan yang dimilikinya. Faccio (2006) dan Chaney (2009), menemukan bahwa

perusahaan yang mempunyai hubungan politik memiliki kinerja lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai hubungan politik dan cenderung memiliki kualitas laporan keuangan yang buruk. Hubungan politik seharusnya dapat mengurangi tindakan manajemen laba, karena perusahaan mendapatkan pengawasan yang ketat dari publik (Chaney, 2009). Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik cenderung melakukan manajemen laba. Wang (2017), menemukan bahwa perusahaan modal ventura yang berhubungan dengan politik melakukan tindakan menaikkan laba saat perusahaan tersebut *go public* atau *Initial Public Offering* (IPO).

Pradipta (2015) menunjukkan bahwa semakin tinggi koneksi politik direktur maka semakin tinggi manajemen laba yang terjadi di perusahaan perbankan. Sedangkan, Fisman (2001) melakukan penelitian mengenai keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1997 yang mengalami kemerosotan. Fisman mencoba menghubungkan masalah ini dengan hubungan politik. Hasil penelitian Fisman yaitu harga saham perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan Presiden Soeharto mengalami penurunan sehubungan dengan rumor kesehatan Presiden Soeharto yang memburuk.

Faktor lainnya yang menjadi pertimbangan adalah struktur kepemilikan. Perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga dianggap memiliki reputasi baik karena adanya keterlibatan keluarga baik dalam manajemen atau pun sebagai pemegang saham (Li, 2010). Konsistensi keluarga untuk terus terlibat dengan perusahaan, memberikan keyakinan kepada bank sebagai kreditur bahwa akan ada

hubungan jangka panjang yang dapat dibina dengan perusahaan keluarga yang dapat menjamin kontrak kredit berjalan sebagaimana mestinya.

Li (2010), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hadirnya keluarga sebagai pemilik perusahaan dapat meningkatkan reputasi perusahaan bahkan menjadi salah satu penentu *loan decision* yang akan diberikan oleh bank. Ia juga menyatakan bahwa selain informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan, reputasi merupakan *complementary element* yang dapat memberikan kemudahan mengakses pinjaman bank. Yang (2012), menyatakan bahwa di Cina bank lebih suka memberikan pinjaman kepada perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) dibandingkan dengan perusahaan swasta. Diskriminasi pemberian kredit ini menunjukkan bahwa alokasi pendanaan bank tidak sepenuhnya bergantung pada *performance* dan perkembangan perusahaan, namun juga bergantung kepada kepemilikan dan koneksi perusahaan.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia banyak yang dimiliki oleh keluarga serta kebanyakan perusahaan juga memiliki hubungan politik dimana Indonesia memiliki rekam jejak mengenai hubungan antara perusahaan dengan politisi sejak era mantan Presiden Soeharto dan masih berlanjut sampai sekarang (Fisman, 2001). Perusahaan-perusahaan di Asia termasuk Indonesia, memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Keadaan ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan Eropa.

Arifin (2003) dan Diyanty (2013), menyatakan bahwa hampir seluruh perusahaan publik di Indonesia dikendalikan oleh keluarga. Dengan struktur

kepemilikan yang terkonsentrasi atau dikendalikan oleh keluarga, dapat terjadi suatu konflik keagenan yaitu konflik keagenan tipe II. Konflik keagenan tipe II adalah konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Konflik keagenan itu diperburuk ketika pemegang saham pengendali meningkatkan kontrolnya melalui struktur piramida, sehingga menimbulkan masalah *entrenchment* yang dapat berujung kepada ekspropriasi pada pemegang saham non-pengendali (Morck, 1998).

Struktur kepemilikan dapat mempengaruhi mekanisme pengawasan yang digunakan perusahaan termasuk juga mengawasi aktivitas manajemen laba (Siregar dan Utama, 2008). Kepemilikan keluarga merupakan salah satu bentuk struktur kepemilikan yang penting. Dalam kepemilikan keluarga, keluarga bisa mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan melalui dua cara yaitu melalui pengaruh *entrenchment* dan pengaruh *alignment* (Wang, 2006). Wang (2006), menyatakan bahwa dalam pengaruh *entrenchment*, laba dikelola secara oportunistik dan kualitas laba rendah. Sebaliknya, dalam pengaruh *alignment* laba tidak dikelola secara oportunistik dan laba memiliki kualitas tinggi.

Menurut argumen *entrenchment effect*, pemegang saham mayoritas (keluarga) memiliki insentif untuk mengambil alih kekayaan dari pemegang saham minoritas. Anggota keluarga biasanya memegang posisi penting di dalam tim manajemen dan dewan pengawas. Dengan demikian, perusahaan keluarga mungkin memiliki tata kelola perusahaan yang lebih rendah dikarenakan pemantauan yang tidak efektif oleh dewan pengawas. Prencipe, Markarian, dan Pozz (2008), memberikan bukti empiris bahwa perusahaan keluarga melakukan

tindakan manajemen laba yang bertujuan untuk mengamankan kepentingan keluarga pengendali.

Bertentangan dengan argumen *entrenchment effect*, argumen *alignment effect* menyatakan bahwa kepentingan keluarga dan pemegang saham lainnya adalah selaras karena besarnya jumlah saham yang dimiliki keluarga dan keberadaan jangka panjang anggota keluarga di perusahaan. Anggota keluarga memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk berperilaku oportunistik karena mereka akan berada dalam perusahaan dalam jangka waktu yang panjang, adanya keinginan untuk mewariskan perusahaannya pada generasi berikutnya serta keinginan untuk menjaga nama baik keluarga. Hal ini akan menyebabkan perusahaan keluarga termotivasi untuk melaporkan laba yang lebih berkualitas.

Perbankan merupakan industri yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Pergantian direksi dan komisaris harus menjadi momentum untuk perbaikan industri keuangan dan perbankan. Seperti fenomena pengangkatan jajaran direksi bank BUMN pada awal 2015 yang diisi oleh tim relawan pemenangan Jokowi-JK. Fenomena ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, karena beberapa dari jajaran direksi tersebut memiliki latar belakang politisi, pejabat di pemerintahan atau militer dan orang-orang terdekat Presiden. Perbankan harus dijalankan dengan profesional, berintegritas, dan

kompeten sehingga industri perbankan memiliki nilai lebih bukan malah sebaliknya.

Sumber:<https://nasional.kompas.com/read/2015/04/12/11412621/16.Politisi.dan.Relawan.Jokowi.Jadi.Komisaris.Bahaya.Menanti.BUMN?page=all>

Pemilihan Indonesia sebagai tempat dilakukannya penelitian didasarkan pada alasan bahwa penelitian mengenai koneksi politik terhadap persistensi laba masih relatif terbatas khususnya di industri perbankan. Industri perbankan dipilih menjadi objek penelitian karena perbankan berbeda dengan industri lain. Perbankan merupakan lembaga intermediasi di bidang keuangan yang dalam menjalankan usahanya menghadapi berbagai macam risiko usaha dan memiliki regulasi yang ketat. Kegagalan kegiatan perbankan berpengaruh luas terhadap sektor ekonomi lainnya, disamping itu sebagai industri jasa bank harus dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan fungsinya.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Andriana, dkk (2016), dan Dwicky Darmawan (2018). Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain: Sampel penelitian Andriana, dkk (2016), menggunakan sampel perusahaan manufaktur, Sampel penelitian Dwicky Darmawan (2018), menggunakan sampel perusahaan sektor jasa, Sedangkan penelitian ini pada sampel perusahaan perbankan di BEI dengan periode penelitian 2014-2018. Variabel penelitian Andriana, dkk (2016), menggunakan variabel independen hubungan politik, ukuran kap, dan audit tenure. Variabel penelitian Dwicky Darmawan (2018), menggunakan variabel independen hubungan politik. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel

independen koneksi politik dan menggunakan variabel pemoderasi kepemilikan keluarga. Dalam penelitian Adriana,dkk (2016), dimana pada sebelumnya memiliki saran untuk memperpanjang periode penelitian agar jumlah perusahaan yang memiliki hubungan politik menjadi lebih banyak.

Sedangkan penelitian Andriana, dkk (2016) dan Dwicky Darmawan (2018), yang mana penelitian sebelumnya terdapat variabel hubungan politik tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Adanya ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu membuat variabel persistensi laba menarik untuk diteliti kembali dan perlunya kajian ulang untuk membuktikannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta dengan melihat fenomena yang terjadi, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Persistensi Laba Dengan Kepemilikan keluarga Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah mengenai pengaruh koneksi politik terhadap persistensi laba dengan kepemilikan keluarga sebagai variabel moderasi. Uraian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah koneksi politik memiliki pengaruh terhadap persistensi laba?
2. Apakah kepemilikan keluarga memiliki pengaruh terhadap persistensi laba?
3. Apakah koneksi politik memiliki pengaruh terhadap persistensi laba dengan kepemilikan keluarga sebagai variabel pemoderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh koneksi politik terhadap persistensi laba dengan kepemilikan keluarga sebagai variabel moderasi. Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap persistensi laba.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga terhadap persistensi laba.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh koneksi politik dan kepemilikan keluarga terhadap persistensi laba dengan kepemilikan keluarga sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan.

Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh investor dan pengguna laporan keuangan lain sebagai sumber referensi untuk membantu dalam membuat keputusan investasi dalam hal menentukan kualitas pelaporan keuangan dan analisis laporan keuangan akibat adanya koneksi politik di perusahaan tujuan umumnya adalah melindungi hak-hak investor ataupun pengguna laporan keuangan lainnya.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan koneksi politik dan persistensi laba dengan kepemilikan keluarga sebagai variabel moderasi, serta menambah wawasan dalam bidang akuntansi khususnya dalam menilai kualitas informasi dari proses akuntansi yaitu laporan keuangan pada perusahaan yang memiliki koneksi politik.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Pembahasan dalam penulisan ini disusun dengan urutan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis, membahas landasan teori yang digunakan untuk membantu dalam memecahkan masalah dan pengembangan hipotesis penelitian serta kerangka penelitian.

Bab ketiga Metode Penelitian yaitu menjelaskan tentang variabel penelitian dan operasional variabel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini beserta penjelasan tentang metode pengumpulan data, serta uraian tentang metode analisis yang digunakan.

Bab keempat Hasil dan Pembahasan yaitu menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, serta hasil uji hipotesisnya.

Bab kelima Kesimpulan dan saran yang menjelaskan tentang apa hasil yang didapat dari hasil olah data dan analisisnya, dan saran-saran untuk peneliti selanjutnya.